



PROFIL NEGARA PAPUA NUGINI

Informasi umum

Nama resmi negara	The Independent State of Papua New Guinea
Bentuk Negara	Parlemerter
Ibukota	Port Moresby
Luas wilayah	Luas daratan 462.840 Km ² . Luas perairan 5.152 Km ² . Garis perbatasan dengan Indonesia di wilayah Propinsi Papua sepanjang 820 Km.
Jumlah penduduk	8.223.878 jiwa (2016)
Lagu kebangsaan	<i>O Arise, All You Sons</i>
Agama/keyakinan	97% Kristen dan selebihnya ananisme. Denominasi Kristen terdiri dari 27% <i>Katholik</i> , 20% <i>Lutheran</i> , 12% <i>United Church</i> , dan 10% <i>Advent</i> . Sebagian kecil lainnya memeluk Islam dan Baha'isme
Bahasa	Terdapat 3 bahasa yakni Tok Pisin (Melanesian Pidgin English), Inggris, dan Hiri Motu. Selain itu terdapat 850 dialek yang dipakai bukan berdasar daerah tetapi berdasar kelompok etnik pemakainya yang acap hanya berjumlah kecil.
Mata uang	PNG Kina (K1=Rp.3500 per Oktober 2016)
Hari kemerdekaan/nasional	16 September
Suku bangsa etnis	Kelompok etnis utamanya terdiri dari Papua Melanesia, Mikronesia dan Polinesia.
Sistem pemerintahan	Monarki konstitusional dengan kepala negara, Ratu Elizabeth II, yang diwakili oleh seorang Gubernur-Jenderal yang saat ini dijabat oleh Mr Michael Ogio. Gubernur Jenderal dipilih oleh anggota parlemen dan hanya melaksanakan tugas-tugas serimonial. Sistem pemerintahan adalah perwakilan demokratik multi partai dalam sistem <i>unicameral</i> parlemen. PNG adalah negara merdeka yang tergabung dalam persemaikmuran Inggris. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini oleh PM. Sedangkan kekuasaan legislative berada di tangan parlemen. Gubernur Jenderal memilih seorang kepala pengadilan tinggi atas saran dari PM dan pemimpin oposisi. Gubernur Jenderal memilih hakim-hakim yang lain atas saran dari suatu Komisi Judisial.
Nama Kepala Negara	Michael Ogio
Nama Kepala Pemerintahan	Peter O'Neill
Nama Menteri Luar Negeri	Rimbink Pato
Duta Besar PNG untuk RI	Peter Ilau
Duta Besar RI untuk PNG	Ronald J.P. Manik
GDP (ppp)	US \$20.47 Juta (2015), US\$18.78 Juta (2014), US\$17.3 Juta (2013)
GDP per kapita	US\$2,700 (2015), US\$2,500 (2014), US\$2,400 (2013)
Komoditas ekspor utama	Minyak, emas, biji tembaga, kayu batangan, minyak kelapa sawit, kopi, kakau, udang air tawar, udang.
Komoditas impor utama	Mesin dan peralatan transportasi, barang kebutuhan sehari-hari, makanan, bahan bakar, bahan kimia.

Keanggotaan di organisasi:

- Regional:
Pacific Islands Development Forum (PIDF), Pacific Islands Forum (PIF), Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Community, the Forum Fisheries Agencies (FFA), The South Pacific Regional Environment Programme (SPREP), Council of Regional Organisations of the Pacific (CROP), The South Pacific Tourism Organisation (SPTO), The Pacific Power Association (PPA), The Pacific Aviation Safety Office (PASO), The Pacific Community, APEC, South Pacific Applied Geoscience Commission, the South Pacific Tourism Organisation.
- Internasional:
UN, UNESCO, WHO, IOM, WFP, UNHCR, UNICEF, ACP, AsDB, ASEAN (observer), CP, ESCAP, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICFTU, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Intelsat, IFRCS, IMO, ICRM, Interpol, IOC, IOM (observer), ISO (correspondent), ITU, NAM, OPCW, SPF, Sparteca, SPC, UNCTAD, UNIDO, UPU, WFTU, WIPO, WMO, WTO.

BENDERA

- Warna hitam, merah dan kuning adalah warna-warni dari budaya PNG yang biasa ditemukan pada berbagai peralatan seni dan pakaian adat PNG.
- Burung berwarna kuning adalah burung dari taman eden yang sangat berarti bagi orang PNG dan burung dalam keadaan sedang terbang berarti kebebasan dan lahirnya Papua New Guinea sebagai bangsa merdeka.
- Lima bintang melambangkan konstelasi Southern Cross, mewakili bintang-bintang Alpha, Beta, Gamma, Delta dan Epsilon yang lebih kecil sehingga tidak mempunyai cahaya sebagaimana bintang-bintang lainnya.
- The Southern Cross melambangkan posisi geografis negara di dunia dan hubungannya ke Australia yang juga mencantumkan Southern Cross di benderanya.

ETIMOLOGI

- Nama Papua dipakai untuk menunjukkan pada bagian dari pulau sebelum berkontak dengan orang-orang Barat. Jadi secara etimologis nama Papua tidak jelas. Satu teori mengatakan bahwa kata Papua adalah dari Bahasa Kesultanan Tidore yang menguasai sebagian wilayah Papua. Asal kata berasal dari *papo* (*to unite*) dan *ua* (*negation*) yang berarti tidak bersatu atau wilayah yang secara geografis jauh sehingga tidak bisa bersatu.
- Anton Ploeg (2002) melaporkan bahwa kata *papua* berasal dari Bahasa Melayu yang berarti *rambut keriting* kepada orang-orang yang mendiami wilayah tersebut.
- Kemungkinan lain sebagaimana dikedepankan oleh Sollenwijn Gelpke (1993) kata *papua* berasal dari Biak, dari ungkapan *sup i papaw* yang berarti the land below (the sunset) dan ditujukan kepada pulau-pulau di sebelah barat Kepala Burung seperti Halmahera.
- Apa pun asal usul dari Papua tentu ada kaitannya dengan wilayah-wilayah di sebelah barat khususnya dengan Halmahera yang pernah dijajah oleh Bangsa Portugis ketika itu. Ketika penjelajah Portugis dan Spanyol tiba di Papua melalui Spice Islands, mereka menganggap bahwa pulau itu adalah Papua. Namun nama *New Guinea* dipakai kemudian oleh orang-orang Barat (Portugis dan Spanyol) yang menganggap persamaan orang-orang pribumi dengan orang-orang asli dari wilayah Guinea di Afrika Barat.

GEOGRAFI

PNG terdiri dari setengah dari pulau New Guinea, New Ireland, New Britain dan Bougainville, kepulauan Manus serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pulau-pulau tersebut terletak di *tropical Oceania* di bagian Barat dari Lautan Pasifik.

PNG terdiri dari banyak pegunungan dan tertutup dengan hutan hujan tropis. Pada wilayah-wilayah yang tinggi New Guinea terbentang dataran tinggi dari New Guinea dan daerah-daerah tertinggi ditutupi salju abadi. Puncak tertinggi adalah Mount Wilhelm dengan puncaknya mencapai 4.509 meter. Terdapat beberapa sungai besar, di antaranya Sepik River (1.126 km), bermuara di pantai Utara; Fly River (1.050 km) bermuara di bagian pesisir Selatan.

PNG berbatasan langsung dengan Propinsi Papua, Indonesia di bagian Barat dengan panjang perbatasan sebesar 820 km. Berbatasan dengan Australia di bagian Selatan. Di bagian Utara berbatasan dengan Lautan Pasifik dan bagian Timur Laut berbatasan dengan Solomon Islands.

Topografi

PNG mempunyai total wilayah seluas 462.840 km² yang berupa daratan seluas 452.860 km² dan air seluas 9.980 km². Panjang garis pantai adalah 5.152 km. Titik paling Utara adalah Pulau Mussau (1°23' S) dan titik paling Selatan (11°29' S). Titik paling Timur adalah Olava, Bougainville (155°57' E) dan titik paling Barat adalah Bovakaka sepanjang Fly River yang berbatasan dengan Mabudawan Indonesia (140°54' E). PNG mempunyai beberapa gunung api karena terletak di sepanjang *Pacific Ring of Fire*. Gangguan karena aktivitas gunung berapi sering menyebabkan gempa bumi yang dasyat dan menyebabkan tsunami. PNG juga selalu mengalami landslides karena deforestasi yang berlebihan pada hutan-hutan yang penting. Pegunungan di PNG juga adalah wilayah yang gampang kena tanah longsor.

Iklim

Posisi geografi PNG yang dekat ke garis katulistiwa dan Australia Utara membuat iklim dipengaruhi musim kemarau dan penghujan dengan suhu rata-rata 26 derajat Celsius. Papua Nugini mempunyai iklim yang tergolong panas dan lembab sepanjang tahun. Curah hujan tertinggi pada highlands bervariasi antara 2000-5000 mm. Angin yang bertiup dari Timur Laut (*northwest monsoon*) terjadi pada bulan Desember-Maret. Sedangkan angin yang bertiup dari Tenggara (*southeast monsoon*) terjadi pada bulan Mei-Oktober. Suhu musiman mengalami perubahan yang sedikit. Pada tempat yang rendah suhu berkisar 27°C, sedangkan pada tempat-tempat tinggi suhu berkisar 21°C sepanjang tahun.

Demografi

Sesuai perkiraan statistik pada bulan Juli 2011 penduduk PNG mencapai 7.059.653 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 3.1% per tahun. Sehingga, pada tahun ini (2016) jumlah penduduk diperkirakan telah mencapai 8.400.000 orang. Sejumlah 83% penduduk hidup di pedesaan dan 17% hidup di perkotaan. Komunitas lokal sejak lama hidup terisolasi dan mulai terbuka serta bersinggungan dengan masyarakat luas sejak tahun 1970-an.

POLITIK

Kekuasaan Eksekutif

Politik di Papua New Guinea (PNG) terjadi di dalam suatu struktur perwakilan demokratis multi-partai di parlemen, dimana perdana menteri adalah kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen. Kekuasaan judisial adalah badan yang independen dari kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislative yang melindungi konstitusi, termasuk kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan menganut agama tertentu, kebebasan bergerak dan berkumpul.

Kepala negara Persemakmuran adalah Ratu atau Raja dari Inggris yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal yang bertindak atas nasehat dari perdana menteri dan kabinet. Gubernur jenderal tersebut dipilih oleh parlemen.

Pemerintahan di PNG dicirikan oleh partai politik yang lemah dan koalisi parlemen yang sangat tidak stabil. Perdana menteri yang dipilih oleh parlemen kemudian memilih anggota kabinet yang lainnya. Setiap kementerian dikepalai oleh anggota kabinet dan dibantu oleh seorang *permanent secretary* yang berkarir sebagai pegawai negeri yang memimpin staf-staf dari kementerian. Sedangkan kabinet terdiri dari para menteri termasuk perdana menteri yang memimpin kementerian-kementerian. Para anggota kabinet menjawab secara politik kepada parlemen.

Gubernur jenderal menentukan dan memilih hakim agung untuk penempatan di makamah agung atas nasehat perdana menteri dan pemimpin oposisi. Gubernur jenderal memilih hakim-hakim lainnya atas saran dari suatu komisi judisial.

JABATAN UTAMA PEMIMPIN PNG

Office	Name	Party	Since
Monarki	Elizabeth II	-----	16 September 1975
Gubernur-Jenderal	Sir Michael Ogio	-----	20 December 2010
Perdana Menteri	Peter O'Neill	<i>People's National Congress Party</i>	2 August 2011 - sekarang

Kekuasaan Legislatif

PNG mempunyai parlemen nasional yang satu kamar (unicameral). Sebelumnya dikenal sebagai House of Assembly. Parlemen mempunyai 111 kursi, 89 dipilih dari *single-member open electorates* dan 22 dari *provincial electorates*. Jadi anggota Parlemen dipilih dalam pemilu untuk bertugas selama 5 tahun. Pemilu yang diadakan paling terakhir adalah pada Juni-Juli 2012.

Reformasi pada bulan Juni 1995 mengubah sistem pemerintah provinsi. Anggota Parlemen dari Propinsi yang menjadi gubernur provinsi, dapat tetap mempertahankan kursi nasionalnya di Parlemen. PNG memiliki 22 anggota Parlemen tingkat provinsi, yakni, dua puluh dari provinsi, satu dari propinsi otonom (Bougainville) dan satu dari NCD Port Moresby (Distrik Ibu Kota Nasional).

Anggota Parlemen terpilih dari sembilan belas provinsi dan Distrik Ibu Kota Nasional. Setelah kemerdekaan pada tahun 1975, anggota Parlemen dipilih dan pengiriman suara dilakukan via pos, dengan pemenang yang sering mendapatkan kurang dari 15% suara. Reformasi pemilu pada tahun 2001 memperkenalkan *Limited Preferential Vote system* (LPV), versi modifikasi dari suara alternatif, di mana pemilih menentukan tiga pilihan pertama di antara para kandidat. Pemilihan umum pertama yang menggunakan sistem LPV diadakan pada tahun 2007. Parlemen memperkenalkan reformasi pada bulan Juni 1995 untuk mengubah sistem pemerintahan provinsi. Anggota Parlemen Provinsi yang menjadi gubernur provinsi masih dapat tetap mempertahankan kursi nasional mereka di parlemen. Namun, jika anggota provinsi menerima posisi sebagai menteri kabinet, peran gubernur jatuh ke salah satu anggota Parlemen dari provinsi.

Results of National Election of PNG From 23 June to about 13 July 2012

No	Party	Candidates	Seats won	% of seats
1	People's National Congress Party	89	27	24.32%
2	Triumph Heritage Empowerment Rural Party	72	12	10.81%
3	Papua New Guinea Party	88	8	7.21%
4	National Alliance Party	75	7	6.31%
5	United Resources Party	48	7	6.31%
6	People's Party	49	6	5.41%
7	People's Progress Party	40	6	5.41%
8	Social Democratic Party	40	3	2.7%
9	Coalition for Reform Party	15	2	2.7%
10	Melanesian Liberal Party	5	2	2.7%
11	New Generation Party	27	2	2.7%
12	People's Movement for Change Party	51	2	2.7%
13	People's United Assembly Party	29	2	2.7%
14	People's Democratic Movement	19	2	2.7%
15	Indigenous People's Party	44	1	0.9%
16	Our Development Party	22	1	0.9%
17	Pangu Party	60	1	0.9%
18	Papua New Guinea Constitutional	39	1	0.9%

	Democratic Party			
19	PNG Country Party	46	1	0.9%
20	Stars Alliance Party	22	1	0.9%
21	United Party	20	1	0.9%
22	Independent	2197	16	14.41%
	Total		111	100%

LIST OF CABINET OF GOVERNMENT OF PAPUA NEW GUINEA

No	NAMA	PORTFOLIO
1	Hon. Peter O'Neill, CMG, MP	Prime Minister Minister for Bougainville Affairs
2	Hon. Leo Dion, GCL QPM, MP	Deputy Prime Minister Minister for Inter-Government Relation
3	Hon. Tommy Tomscoll, MP	Minister for Agriculture and Livestock
4	Hon. Davies Steven, MP	Minister for Civil Aviation
5	Hon. Jimmy Miringtoro, MP	Minister for Communication and Information Technology
6	Hon. Jim Simitab, MP	Minister for Correctional Service
7	Hon. Dr. Fabian Pok, MP	Minister for Defence
8	Hon. Nick Kuman, MP	Minister for Education
9	Hon. John Pundari, MP	Minister for Environment and Conservation
10	Hon. James Marape, MP	Minister for Finance
11	Hon. Moa Zemiing CMG, MP	Minister for Fisheries and Marine Resources
12	Hon. Rimbink Pato, OBE, LLB, MP	Minister for Foreign Affairs and Immigration
13	Hon. Douglas Tomuriesa, MP	Minister for Forest and Climate Change
14	Hon. Michael Malabag, CBE, OBE, MP	Minister for Health and HIV AIDS
15	Hon. Francis Marus, MP	Minister for Higher Education Research and Technology
16	Hon. Paul Isikiel, MP	Minister for Housing and Urban Development
17	Hon. Ano Pala, CMG, ISO, LLB, MP	Minister for Justice and Attorney General
18	Hon. Benjamin P Poponawa, MP	Minister for Labour and Industrial Relations
19	Hon. Benny Allen, MP	Minister for Lands and Physical Planning
20	Hon. Byron Chan, MP	Minister for Mining
21	Hon. Charles Abel, MP	Minister for National Planning and Monitoring
22	Hon. Nixion Durban, MP	Minister for Petroleum and Energy
23	Hon. Robert Atiyafa, MP	Minister for Police
24	Hon. William Duma, MP	Minister for Public Enterprises and State Investment
25	Hon. Puka Temu, KBG, CMG, MP	Minister for Public Service
26	Hon. Delilah Gore, MP	Minister for Religion, Youth and Community Development
27	Hon. Justin Tkatchenko, BEM, OI, MP	Minister for Sports, National Events and APEC
28	Hon. Tobias Kulang, MP	Minister for Tourism, Arts and Culture
29	Hon. Richard Maru, Btech, MBA, OBE, MP	Minister for Trade, Commerce and Industry
30	Hon. Malakai Tabar, MP	Minister for Transport and Infrastructure
31	Hon. Patrick Pruaitch, CMG, MP	Minister for Treasury
32	Hon. Francis Awesa, MP	Minister for Works and Implementation

Kekuasaan Yudisial

Kekuasaan Yudisial di PNG bersifat independen dari pemerintah dan melakukan perlindungan hak konstitusional dan menafsirkan hukum. Adapun tingkatannya, yang berpuncak pada Mahkamah Agung PNG, yaitu Pengadilan Banding atau Pengadilan Nasional; *Chief Justice*, atau Ketua Mahkamah Nasional, ditunjuk oleh Gubernur Jenderal atas usulan dari Dewan Eksekutif Nasional setelah berkonsultasi dengan Menteri yang bertanggung jawab terhadap masalah kehakiman. Hakim lain dari Pengadilan Nasional, yang tersedia untuk duduk sebagai anggota bangku ad hoc Mahkamah Agung ditunjuk oleh Komisi Yudisial.

EKONOMI

PNG kaya dengan sumber daya alam (emas, tembaga, bauksit) dan energy (minyak dan LNG) serta hutan. Sektor pertanian melibatkan 85% penduduk dan hanya menyumbang 1/3 dari gross domestic product (GDP), yaitu berasal dari kopi, teh, cocoa, kelapa, dan minyak kelapa sawit. Sedangkan sektor mineral dan energy menyumbang 2/3 GDP.

Cadangan LNG diperkirakan mencapai 14 triliun cubic feet (tcf). Proyek LNG mulai dibangun tahun 2009 oleh perusahaan Exxon Mobil dengan total investasi US\$17,5 Juta dengan ekspektasi produksi 6,6 juta metric ton LNG per tahun sejak tahun 2014. PNG menggandeng InterOil (Kanada) untuk proyek LNG kedua di Provinsi Gulf, yang sahamnya juga dimiliki Bechtel and ConocoPhillips (Amerika Serikat/ AS) dan Korea Gas. Menurunnya harga minyak dan gas di pasaran dunia sejak dua tahun terakhir mempengaruhi pertumbuhan ekonomi PNG yang sebelumnya mencapai rata-rata 8.5% menjadi sekitar 4% pada tahun 2016.

Beberapa lokasi tambang potensial: Tambang Emas Porgera di Provinsi Enga; Tambang Emas Lihir di Provinsi New Ireland; Tambang Emas Ok Tedi di Provinsi Western yang berbatasan dengan Indonesia (Pada bulan Maret 2016, perusahaan OK Tedi Mine Limited mulai lagi beroperasi setelah ditutup sementara waktu karena kejadian kekeringan pada tahun 2015); tambang emas dan tembaga di dasar laut pada kedalaman 1.600 meter di dasar laut Bismarck, Utara PNG. Total ekspor emas dan tembaga itu merupakan 62% dari total ekspor PNG. Di tahun 2016 produksi emas PNG 70,5 ton, peringkat ke-10 produsen emas terbesar dunia.

Sesuai Vision 2050, PNG berharap mampu menjadi negara berpenghasilan menengah pada tahun 2050 yang pencapaiannya diarahkan melalui *Papua New Guinea Development Strategic Plan* (PNG DSP) 2010-2030, dan *Medium Term Development Plans* (MTDPs) yang berjangka 5 tahun. PM O'Neill menerapkan "*Look to the North Policy*" untuk menunjang pembangunan ekonomi dengan meningkatkan hubungan dengan negara-negara ekonomi besar dan menengah di Asia.

Dalam implementasi "*Look to North Policy*", sekaligus meletakkan dasar-dasar hubungan kerjasama yang luas dengan negara-negara tetangga di Asia termasuk Indonesia. Kunjungan kerja PM O'Neill ke Indonesia, telah dilakukan sebanyak tiga kali pada tahun 2013 dan tahun 2014, dan pada tahun 2015, O'Neill memilih Indonesia sebagai negara tujuan liburannya.

PDB (berdasar paritas daya beli/PPP): US\$ 26.97 juta (2015 est.) US\$ 25.30 juta (2014 est.) US\$ 23.57 juta (2013 est.) catatan: data tahun 2015, dalam dolar AS dibandingkan dengan negara dunia: 135	GDP - per kapita (PPP): US\$ 3.500 (2015 est.) US\$ 3.400 (2014 est.) US\$ 3.200 (2013 est.) dibandingkan dengan negara dunia: 180
PDB (berdasar nilai tukar resmi): US\$ 21.19 juta (2015 est.) <i>Gross National Saving:</i> 38,1% dari PDB (2015 est.) 24% dari PDB (2014 est.) -11,7% Dari PDB (2013 est.)	GDP - tingkat pertumbuhan riil: 6,6% (2015 est.) 7,4% (2014 est.) 4,7% (2013 est.)

<p>Pertanian - produk: Kopi, kakao, kopra, biji sawit, teh, gula, karet, ubi jalar, buah, sayuran, vanili; unggas, babi; kerang-kerangan</p>	<p>GDP - Komposisi, dengan sektor asal: pertanian: 23% industri: 37,8% Layanan: 39,2% (2015 est.)</p>
<p>Industri: Kopra <i>cruching</i>, pengolahan kelapa sawit, produksi kayu lapis, kayu produksi Chip; pertambangan (emas, perak, tembaga); minyak mentah dan produk minyak bumi; konstruksi, pariwisata Tingkat pertumbuhan produksi industri: 10,8% (2015 est.)</p>	

HUBUNGAN BILATERAL DENGAN INDONESIA

Bidang Politik

Dukungan Pemerintah PNG dalam

1. Pencalonan Prof. Harkristuti Harkrisnowo sebagai Anggota *Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)* Periode 2016-2019 yang pemilihannya dilaksanakan pada pertemuan *19th Session of the Meeting of the States Parties to the CEDAW* di New York tanggal 21 Juni 2016.
2. Pencalonan Indonesia sebagai Anggota *World Heritage Committee (WHC) UNESCO* Periode 2015-2017 yang pemilihannya dilakukan pada pertemuan General Assembly WHC UNESCO di Paris tanggal 18-20 November 2015.
3. Pencalonan Indonesia sebagai Member of the Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO) Part III periode 2016-2019.
4. Pencalonan Dubes Nugroho Wisnumurti sebagai Anggota *UN International Law Commission* Periode 2017-2021 yang pemilihannya dilaksanakan di New York tanggal 03 Nopember 2016.
5. Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional Kategori C Periode 2016-2017 yang pemilihannya dilakukan pada Sidang Majelis IMO ke-29 tanggal 23 November-4 Desember 2015.
6. Pencalonan Indonesia sebagai Anggota *World Heritage Committee (WHC) UNESCO* Periode 2015-2017 yang pemilihannya dilakukan pada pertemuan General Assembly WHC UNESCO di Paris tanggal 18-20 November 2015.

Kunjungan para Pejabat:

1. Tidak lama setelah Peter O'Neill terpilih sebagai Perdana Menteri ke-9 PNG pada 2 Agustus 2012, beliau hadir pada *Bali Democratic Forum (BDF) V*, pada tanggal 8 – 9 November 2012 di Bali.
2. Pada 17 Juni 2013, PM O'Neill telah berkunjung secara resmi ke Indonesia dan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RI guna melanjutkan pembahasan isu-isu prioritas pengembangan kerjasama bilateral RI-PNG sebagaimana yang telah mulai dibahas dalam Pertemuan Bilateral di sela-sela Sidang BDF-V.
3. Selanjutnya di sela-sela *APEC Economic Leaders Meeting (AELM)* di Nusa Dua, Bali, kedua Pemimpin Ekonomi telah melakukan pertemuan bilateral yang kedua untuk tahun 2013. Presiden RI dan PM Peter O'Neill pada kesempatan itu telah menyaksikan acara penanda-tanganan *Plan of Action for the Implementation of the Comprehensive Partnership between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea* oleh Menteri Luar Negeri RI Dr. R.M. Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri PNG Rimbink Pato.
4. PM O'Neill hadir pada Acara Pelantikan Presiden RI, Joko Widodo, tanggal 20 Oktober 2014 di

- Gedung MPR RI. Dalam kunjungan itu, Beliau didampingi Menteri Luar Negeri Hon. Rimbink Pato, MP dan Menteri BUMN dan Promosi Investasi, Hon. Ben Micah, MP.
5. Menlu PNG Rimbink Pato pada 11-16 Januari 2013 telah mengikuti kunjungan para Menlu MSG ke Indonesia yang dipimpin Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Fiji, Ratu Inoke Kubuabola. Para Menlu anggota MSG mengunjungi Jakarta, Jayapura dan Ambon.
 6. Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI yang dipimpin Manuel Kaisiepo/ Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (Komisi VII) dengan anggota Diaz Gwijangge/ Fraksi Partai Demokrat (Komisi X), Dra. RA Ida Riyanti/ Partai Demokrat. (Komisi X), Dr. H. Harry Azhar Azis, MA, Fraksi Partai Golkar (Komisi X) telah melakukan kunjungan ke Port Moresby pada tanggal 19-21 November 2013.
 7. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan tiba di Bandar Udara Internasional Jackson, Port Moresby, Papua Nugini, Kamis (11 Maret 2010) petang waktu setempat. Presiden Yudhoyono serta rombongan disambut Perdana Menteri Papua Nugini Michael T Somare. Upacara penyambutan kenegaraan dilakukan dengan dentuman meriam, mengumandangkan lagu kebangsaan kedua negara, serta pemeriksaan barisan oleh Presiden Yudhoyono.
 8. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Port Moresby pada tanggal 12 Mei 2015. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua New Guinea (PNG) untuk melanjutkan kerjasama bilateral. Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi serta sejumlah Menteri Kabinet Kerja.
 9. Kunjungan Menkopolkam, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan telah kunjungan kerja ke Provinsi Papua, dan negara tetangga Papua Nugini (PNG), 28-30 Maret 2016.

Penandatanganan perjanjian bilateral:

1. Penandatanganan 11 perjanjian bilateral antara Indonesia-PNG di Istana Merdeka Jakarta, 17 Juni 2013, Presiden RI dan PM PNG telah menyaksikan penanda-tanganan tersebut oleh menteri-menteri terkait kedua negara, yaitu:
 - i. *Agreement on Air Transport;*
 - ii. *MoU for Cooperation in Mineral Resources Development;*
 - iii. *MoU for Cooperation in Petroleum and Energy Resources Development;*
 - iv. *MoU on Education Cooperation;*
 - v. *MoU on Higher Education Cooperation;*
 - vi. *MoU on Sports Cooperation;*
 - vii. *MoU on Tourism Cooperation;*
 - viii. *MoU on Youth Cooperation;*
 - ix. *MoU on Diplomatic Education and Training;*
 - x. *Extradition Treaty;*
 - xi. *Basic Agreement on Border Arrangements.*
2. Pada saat kunjungan kehormatan para menteri Kabinet RI kepada PM Peter O'Neill di Jakarta, 18 Juni 2013, telah ditanda-tangani tiga perjanjian kerjasama bisnis, yaitu:
 - i. PT. Pertamina - *National Petroleum Company PNG (NPCP).*
 - ii. KADIN - *PNG Chamber of Commerce and Industry;*
 - iii. PT. Telkom dan *Telikom PNG.*
3. Di sela-sela APEC *Economic Leaders Meeting (AELM)* di Nusa Dua, Bali, tahun 2013 kedua Pemimpin Ekonomi, yaitu Presiden RI dan PM Peter O'Neill telah menyaksikan acara penanda-tanganan *Plan of Action for the Implemantion of the Comprehensive Partnership between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea* yang telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI Dr. R.M. Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri PNG Rimbink Pato.

Bidang Ekonomi

Hubungan Perdagangan RI dengan PNG

PNG merupakan negara tetangga Indonesia yang berbatasan sepanjang 679 Km dengan Provinsi Papua. Kondisi ini memiliki keuntungan ekonomi tersendiri yang mulai dimanfaatkan masyarakat

termasuk di daerah perbatasan. Pada kurun waktu dua dekade ke belakang mitra dagang PNG hanya terarah kepada Australia dan New Zealand. Sekarang mitra PNG adalah negara-negara Asia seperti China, Jepang, Korea Selatan, India, Malaysia, dan Singapura. Indonesia harus bersaing ketat untuk dapat memasuki pasar PNG.

Sesuai statistik PNG, Indonesia baru masuk ke dalam 10 besar mitra impor PNG dengan urutan ke-8. Dari total impor PNG yang mencapai US\$8,340,687,556, impor berasal dari Australia 34,35%; Singapura 14,30%; Jepang 6,39%; Malaysia 6,33%; AS 5,83%; Italia 3,94%; Indonesia 3,03%; Thailand 2,88%; dan New Zealand 2,01%.

Prospek ke depan dalam pengembangan kerjasama kedua negara dalam bidang perdagangan, sebagaimana pernah diungkapkan dalam hasil study kantor ADB di Port Moresby beberapa tahun lalu, adalah pengembangan wilayah perbatasan RI-PNG Skow-Wutung sebagai *regional economic and trade zone*. Hal ini didukung oleh letak strategis daerah tersebut dan kebijakan pembangunan pemerintah kedua negara yang saat ini sangat mengedepankan konektivitas.

Demikian pula Pemerintahan O'Neill sedang giat memperbaiki dan memperluas jaringan infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan laut dan udara, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sangat baik dalam beberapa tahun terakhir ini. Jalan-jalan raya sedang diperbaiki dan dibangun untuk menghubungkan sentra-sentra ekonomi di wilayah pegunungan yang kaya hasil pertanian dengan pelabuhan internasional Lae (di Morobe Province). Pembangunan ini dibiayai dengan dana pinjaman lunak dari Exim Bank China sebesar US\$5 milyar.

Dikembangkannya wilayah perbatasan Skow-Wutung sebagai *economic-hub* ditunjang dengan kebijakan konektivitas oleh pemerintah kedua negara, akan menjadikan wilayah itu sebagai pintu masuk dan keluar arus barang melalui laut. Konektivitas dua pelabuhan besar, Jayapura di Indonesia dan pelabuhan internasional Lae dijumpai oleh pelabuhan antara/persinggahan diantaranya (Wewak, Madang) di PNG.

Beberapa kendala sebagai penyebab belum meningkatnya aktivitas pasar ke dua negara disebabkan kurangnya minat misi dagang dan investasi dari Indonesia ke PNG vis versa, kurangnya *business to business contact* yang dapat memperkuat pengenalan peluang kondisi ekonomi masing-masing, dan adanya penekanan perhatian kedua negara terhadap isu-isu keamanan dan perbatasan yang menyita perhatian kepada isu pengembangan ekonomi dan perdagangan.

Keberadaan diaspora Indonesia di PNG utamanya 3 keluarga pengusaha besar merupakan potensi yang dapat mendorong masuknya lebih banyak produk Indonesia dan ke depannya merupakan modal dalam meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. Adapun ke 3 keluarga tersebut adalah: Keluarga Chandra yang memiliki bendera bisnis "Papindo Group" dengan berbagai anak perusahaannya yang merambah bisnis retail, konstruksi, angkutan laut. Sir Soekendar Chandra dan Joko Chandra dan dua saudara perempuannya (semua sudah menjadi WN PNG) adalah bagian dari keluarga Chandra di Indonesia yang memiliki bendera bisnis "Mulia Group".

Di samping itu ada pula "SVS Group" yang dimiliki dan dikelola oleh dua bersaudara, Wahyu Hanafi dan Hidayat Hanafi (masing-masing masih WNI) asal Kalimantan dan telah bermukim di PNG selama 27 tahun. Perusahaan ini bergerak dalam retail dan sebagai agen distribusi tunggal berbagai group produsen makanan olahan dan barang lainnya di Indonesia. Group ini memiliki 15 buah supermarket di seluruh negeri, tiga diantaranya di Port Moresby. Saat ini bersama pemerintahan PNG mengembangkan 1.000 warung kecil terbuat dari "container" yang tersebar di pemukiman-pemukiman dengan memberdayakan penduduk setempat sebagai pengelola. Proyek ini akan membantu SVS Group sebagai supplier terbesar untuk barang konsumsi.

Garamut Group milik keluarga James Cheong keturunan Tionghoa yang pernah bermukim di Jayapura dan pada tahun 1963 ikut melarikan diri ke wilayah PNG bersama-sama rombongan Papua sebagai akibat adanya ketegangan politik menjelang bergabungnya Irian Jaya dengan Republik Indonesia sesuai hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diakui oleh PBB. James mulai merintis bisnis di Wewak, West Sepik Province, dan saat ini menjadi salah satu perusahaan besar yang ada di PNG dengan menggeluti bisnis retail, konstruksi, *real estate*.

Neraca perdagangan

RI-PNG telah memiliki dasar kuat untuk semakin meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi sejalan dengan ditanda-tanganinya "Plan of Action for the Implementation of the Comprehensive Partnership" oleh kedua Menlu pada tgl 7 Oktober 2013 di Bali. *Plan of Action* a.l.

mengatur tentang *Trade and Investment Promotion; Air Transportation Cooperation; Border Trade and Investment; dan Tourism Cooperation*.

Dari statistik Kementerian Perdagangan Indonesia, pada Januari–Agustus 2016 nilai total perdagangan RI–PNG mencapai US\$109.946.200,00 dengan total ekspor Indonesia mencapai US\$99.619.600,00 dan impor US\$10.326.600,00, sehingga pada pertengahan tahun 2016 Indonesia surplus US\$89.293.000,00. Total nilai perdagangan pada tahun 2015; 2014; dan 2013 masing-masing mencapai surplus US\$184.640.200,00; US\$111.558.800,00; dan US\$97.404.400,00, sehingga terlihat terjadi penurunan. Namun meski menurun, Indonesia tetap memperoleh keuntungan yang besar.

Dari statistik Kementerian Perindustrian Indonesia, terlihat ekspor utama Indonesia ke Papua New Guinea pada tahun 2011–2014 meliputi: besi baja; mesin dan otomotif; makanan dan minuman; alat-alat listrik; pengolahan kelapa/ kelapa sawit; karet olahan; tekstil; aluminium olahan; pulp dan kertas; keramik, marmer dan kaca; komoditi lainnya; kimia dasar; plastik; semen dan produk dari semen; kulit, barang kulit dan sepatu/alas kaki; kosmetika; tembaga olahan, timah.; barang-barang kimia lainnya; rotan olahan; elektronika; tetes olahan; rokok; produk farmasi; minyak atsiri; kamera dan alat-alat optiks; alat olahraga, musik, pendidikan dan mainan; kayu olahan; barang kerajinan; pupuk; produk olahan dari emas, perak, logam mulia, perhiasan; dan makanan ternak.

Sedang impor utama Indonesia dari Papua New Guinea (pada tahun 2011–2014) meliputi: besi baja mesin dan otomotif, pulp dan kertas; kayu olahan; makanan dan minuman; elektronika; dan plastik.

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA dengan PAPUA NUGINI Periode: 2011 - 2016

(Nilai : Ribuan US\$)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Trend(%) 2011-2015	Jan-Agu		Perub.(%) 2016/2015
							2015	2016	
TOTAL PERDAGANGAN	443.396,4	256.502,5	253.578,7	206.680,2	223.919,4	-14,63	169.997,0	109.946,2	-35,32
MIGAS	53,3	44,8	6,2	23,5	28,7	-17,16	5,3	3.691,1	69.143,56
NON MIGAS	443.343,1	256.457,7	253.572,5	206.656,7	223.890,7	-14,63	169.991,7	106.255,1	-37,49
EKSPOR	305.788,2	199.673,2	175.491,6	159.119,5	204.279,8	-9,82	155.257,4	99.619,6	-35,84
MIGAS	53,3	44,8	6,2	23,1	28,7	-17,31	5,3	3.691,1	69.143,56
NON MIGAS	305.734,9	199.628,4	175.485,4	159.096,4	204.251,1	-9,82	155.252,0	95.928,5	-38,21
IMPOR	137.608,3	56.829,3	78.087,1	47.560,7	19.639,6	-33,45	14.739,6	10.326,6	-29,94
MIGAS	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
NON MIGAS	137.608,3	56.829,3	78.087,1	47.560,3	19.639,6	-33,45	14.739,6	10.326,6	-29,94
NERACA PERDAGANGAN	168.179,9	142.843,9	97.404,4	111.558,8	184.640,2	-0,60	140.517,7	89.293,0	-36,45
MIGAS	53,3	44,8	6,2	22,7	28,7	-17,46	5,3	3.691,1	69.143,56
NON MIGAS	168.126,6	142.799,1	97.398,3	111.536,1	184.611,5	-0,60	140.512,4	85.601,9	-39,08

Sumber: BPS, Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade

Partisipasi PNG pada program pelatihan Indonesia

Pada tahun 2013, Kementerian Pertanian RI mengadakan Pelatihan Pertanian dan Karantina Tanaman. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka kerjasama Selatan–Selatan dan PNG merupakan salah satu target pesertanya. Pada tahun 2015, Kementerian Luar Negeri mengadakan pelatihan di Port Moresby atas peserta usaha kecil menengah (UKM) dengan mengirimkan staf dari Jakarta untuk melatih peserta sekitar 50 orang dari PNG. Demikian juga, terdapat peserta pelatihan pertanian dari PNG yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di Jayapura Papua pada tahun 2013 dan 2015. PNG juga mengirim dua pegawai karantina tanaman untuk mengikuti kegiatan pelatihan karantina pertanian di Jawa Barat.

Direktorat Kerjasama Teknik telah menyelenggarakan dua kali pelatihan pembangunan kapasitas bagi PNG di daerah perbatasan, yaitu untuk bidang pariwisata dan bidang otomotif masing-masing pada bulan November 2015 dan Agustus 2016. Dalam kurun waktu 2015-2016 tercatat sejumlah 130 orang PNG yang telah mendapatkan training di berbagai bidang, seperti pengolahan bahan pangan,

inseminasi buatan, kerajinan tangan, otomotif, pariwisata, pengolahan rumput laut, dan multimedia. Pada tahun 2016, terdapat 3 peserta PNG mengikuti training pengolahan kelapa di Manado (Mei), satu orang untuk beasiswa BSBI, seorang wartawan untuk pelatihan multimedia di Yogyakarta (Juli), satu orang mengikuti pelatihan pariwisata di Bali (Agustus), 4 peserta mengikuti training di bidang pengolahan sampah produk pertanian (“zero waste processing agricultural product”) di Malang (September dan seorang untuk training Sesparlu Internasional.

Bidang Sosial Budaya

Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan RI – PNG

Kerjasama pendidikan RI-PNG sebenarnya telah dilakukan sejak PNG belum merdeka. Pada tahun 1974 sudah ada masyarakat PNG yang mendapat beasiswa Darmasiswa, tetapi secara formal kerjasama pendidikan RI-PNG baru dimulai pada 2 Mei 1997 yang ditandai dengan penandatanganan MoU Pendidikan RI-PNG. MoU itu berakhir pada tahun 2004, sehingga kegiatan kerjasama pendidikan RI-PNG terpaksa berhenti. Sejak itu tidak mudah untuk menghidupkan kembali kerjasama pendidikan bilateral. Namun akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, Sains dan Teknologi PNG berhasil menandatangani Pembaruan MoU antara Perguruan Tinggi RI dan PNG.

Sejalan dengan visi menggalakkan *people to people contact*, Pemerintah RI berperan aktif dalam melaksanakan program pendidikan melalui pemberian beasiswa, pertukaran pelajar/ mahasiswa RI-PNG. Beasiswa Pemerintah RI diberi dalam berbagai manajemen yang berbeda antara lain Darmasiswa, Kesetaraan Negara Berkembang (KNB) dan Beasiswa Unggulan (BU) dengan pengelola utama adalah BPKLN, Kemendikbud RI.

Sedangkan, kemitraan antar perguruan tinggi antara lain adalah University of PNG (UPNG) dengan Universitas Cendrawasi dan DWU dengan Cendrawasih. Kemitraan yang disebutkan terakhir ini telah ditandatangani MOU namun secara teknis belum dilaksanakan (2016).

Beasiswa Darmasiswa

Darmasiswa merupakan beasiswa jangka pendek yang diperkenalkan Pemerintah RI pada tahun 1974. Sampai tahun 2014 terhitung sebanyak 43 beasiswa Darmasiswa telah diberi kepada warga PNG. Tiga belas beasiswa Darmasiswa diberi dalam kurun waktu 2011–2014 dengan perincian 7 beasiswa diberi melalui KBRI Port Moresby dan 6 melalui KRI Vanimo.

Beasiswa Unggulan BPKLN dan KNB

Beasiswa Unggulan (BU) BPKLN Kemdikbud merupakan beasiswa Pemerintah RI yang diperuntukkan bagi mahasiswa asing dan merupakan program terbaru yang dimulai pada tahun 2008. Beasiswa BU diberi kepada PNG sejak T.A. 2011/ 2012 dan sampai saat ini sudah 100 beasiswa Unggulan diberi kepada PNG. Sementara itu, beasiswa KNB telah diimplementasikan dan telah diberi kepada PNG lebih awal dibanding BU. Beberapa alumni yang tercatat sebagai penerima KNB antara lain Presiden, Sekretaris dan Bendahara PNG-IAA.

Penanda-tanganan MOU bidang Pendidikan

MoU Pendidikan RI–PNG yang merupakan landasan hukum bagi kerjasama bilateral sempat berakhir pada tahun 2004, yang mengakibatkan banyak kegiatan kerjasama pendidikan terpaksa harus berhenti. Pembaruan MoU baru dapat kembali ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2013 di Jakarta. Beberapa MoU Pendidikan dan Kebudayaan antara Indonesia-PNG pada tingkat Perguruan Tinggi dan Pemerintah Provinsi secara ringkas disajikan sebagai berikut:

No.	MoU Pendidikan	RI	PNG	Penanda-tanganan MoU	Lokasi Penandatanganan MoU
1.	RI-PNG			17-06-2013	Jakarta
2.	RI-PNG	UNCEN	PNG Unitech	06-12-2013	Lae
3.	RI-PNG	UNCEN	DWU	In progress	Jayapura
4.	RI-PNG	UNHAS	PNG Unitech	18-09-2014	Makassar-Lae

5.	RI-PNG	Papua	NCD	In progress	Jayapura
6.	RI-PNG	Jateng	Enga	In progress	Semarang

Pertukaran mahasiswa dan pelajar

Selain pengajaran Bahasa Indonesia dan memberi beasiswa Pemerintah Indonesia, maka dalam mendukung misi *people to people contact* Satker Atase Pendidikan melaksanakan program pertukaran pelajar/ mahasiswa dengan PNG. Kegiatan ini terlaksana selama periode 2011-2014 kecuali pada tahun 2012. Para pelajar yang terlibat pada program pertukaran pelajar/ mahasiswa RI-PNG secara detail disajikan pada Lampiran.

Pelatihan ICT dan *distance learning* di UPNG

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan *Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Center (SEAMOLEC)*, *the University of Papua New Guinea (UPNG)* dan Satker Atase Pendidikan KBRI Port Moresby, mengadakan Pelatihan ICT dan *Distance Learning* di UPNG, pada 2–5 Oktober 2013. Narasumber pada Pelatihan itu terdiri dari Yusmar Hadi Saputra, *the Head of SEAMOLEC Multi Studio*, Dona Octanary, *SEAMOLEC IT expert* dan Paul Hamadi, *Seamolec expert*. Kegiatan diikuti 38 peserta dari berbagai departemen di UPNG antara lain *Open College*, *Natural and Physic Science*, *Research and Development* dan *Flexible Open Distance Education (FODE) PNG*. Kegiatan pelatihan dibuka secara resmi oleh *Pro-Vice Chancellor of Academic and Student Affairs of the UPNG*, Prof. Sabba RAO.

Pelatihan difokuskan pada pemanfaatan ICT pada *distance learning*. Materi yang diberi termasuk penggunaan EDMODO sebagai media pembelajaran sosial, pengembangan buku digital, dan pembuatan video kuliah sederhana.

Pelatihan ditutup oleh *the Pro-Vice Chancellor of Planning and Development-UPNG*, Prof. Vincent Malaibe. Pada kesempatan itu pihak SEAMOLEC–the UPNG dan Satker Atase Pendidikan setuju untuk melaksanakan pelatihan lanjutan berupa *Broadcasting Video through Streaming for Education and Android Application Development*.

Pendampingan studi banding tokoh masyarakat PNG ke RI

Kegiatan lain dalam mendukung *people to people contact* dilakukan melalui fasilitasi masyarakat RI atau PNG yang ingin melakukan kunjungan studi banding. Beberapa kegiatan studi banding telah dilakukan pihak PNG dengan melakukan berbagai kunjungan ke Indonesia antara lain:

- Studi banding oleh 8 orang pejabat *Sandaun Provincial Administration, Division of Agriculture and Livestock*, PNG ke Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Provinsi Bali, pada 28 Oktober – 09 November 2012;
- Studi banding oleh *Local Level Government (LLG) Ambenop, Madang District, Madang Province* ke Provinsi Papua pada 26 – 30 Mei 2013;
- Studi banding oleh Kepala Sekolah, para guru dan penilik sekolah dari *Lions Morata Vocational Training center Port Moresby* ke Jayapura pada akhir September 2013.

Peresmian *Indonesian Language and Multimedia Center* di *St. Joseph's International Catholic*

Dalam mendukung pengajaran bahasa Indonesia di PNG, Satker Atase Pendidikan KBRI Port Moresby bekerjasama dengan beberapa sekolah dan Universitas di Port Moresby antara lain *St. Joseph's International Catholic College (St. Joseph's ICC)*, *Lions Morata Vocational Training Center (LMVTC)*, dan UPNG. Kerjasama dilakukan dengan mendirikan laboratorium bahasa. Untuk kegiatan ini fasilitas ruangan disediakan pihak sekolah PNG sedang *equipment* disediakan Indonesia. Pada 14 September 2012 telah dilakukan peresmian *Indonesian Language and Multimedia Center (ILMC)* di *St. Joseph's ICC*. Selanjutnya direncanakan untuk meresmikan ILMC di UPNG pada tahun 2013, tetapi sampai saat ini belum terlaksana karena ruangan khusus belum tersedia. Sementara itu, di LMVTC telah diresmikan *Indonesian Corner* yang dimaksudkan sebagai embrio dari ILMC di LMVTC.

Partisipasi Indonesia pada MFAC

Dalam implementasi kerjasama kebudayaan, Indonesia mengikuti the 5th *Melanesian Festival of Arts and Culture (MFAC) 2014* yang dilaksanakan di PNG, 28 Juni–11 Juli 2014, dengan mengirim delegasi dari berbagai provinsi khususnya bagian Timur (Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku

Utara, Papua Barat dan Papua). Delegasi terdiri dari kelompok sanggar budaya dan seni serta peserta symposium. Delegasi Indonesia pada the 5th MFAC 2014 terdiri dari 200 orang (NTT = 11 orang, terdiri dari 7 penari, 2 perias, 1 peserta symposium dan 1 pendamping; Ambon = 11 orang terdiri dari 9 penari mahasiswa UNPATTI, dan 2 peserta symposium, satu peserta symposium berperan sebagai pembimbing mahasiswa; Manokwari = 18 orang yang merupakan group band "WONIAI"; Pemprov Papua = 158 orang terdiri dari 99 orang artis dan seniman daerah, termasuk peserta pameran dan 59 orang pemimpin provinsi Papua).

Indonesia berstatus sebagai *observer* dalam partisipasinya di festival seni budaya MSG. Keikutsertaan Indonesia ini merupakan yang pertama dalam kegiatan MFAC yang dilakukan sekali dalam empat tahun dan diselenggarakan secara berpindah-pindah di antara sesama negara MSG.

Keputusan untuk keikutsertaan Indonesia pada festival diawali dengan undangan lisan yang disampaikan PM Peter O'Neill kepada Presiden RI, Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat kunjungan ke Indonesia pada 16-18 Juni 2013 yang ditanggapi secara positif oleh Bapak Presiden. Undangan lisan disusul surat PM O'Neill yang ditujukan kepada Dubes RI di Port Moresby tentang undangan resmi bagi Pemerintah RI untuk berpartisipasi dalam festival.

Delegasi RI datang dengan jumlah cukup besar, yakni ± 210 orang, dan merupakan delegasi terbesar kedua setelah New Caledonia/Kanak yang berjumlah 280 orang. Delegasi lainnya, Fiji 110 orang, Solomon Islands 160 orang, *Torres Straits* (Aborigin) dengan jumlah kecil dan Timor Leste yang juga *observer* tidak mengirim delegasi.

Dipandang dari berbagai aspek, partisipasi Indonesia dalam festival berhasil baik, bahkan jauh lebih baik dari perkiraan semula. Pencapaian dari misi keikutsertaan Indonesia dalam festival, antara lain ditunjukkan oleh:

- a. Berhasil menghambat upaya kelompok "*West Papua*" untuk menjadikan dirinya sebagai representatif masyarakat Papua dan mencegah upaya mereka untuk memanfaatkan festival sebagai wahana propaganda politiknya;
- b. Membuka wawasan masyarakat PNG dan masyarakat Melanesia di sub-kawasan bahwa ada sejumlah besar komunitas Melanesia di Indonesia bagian timur yang tersebar di 5 provinsi;
- c. Menegaskan bahwa rakyat Melanesia Papua secara sah diwakili Pemda Provinsi Papua dan Pemda Provinsi Papua Barat yang masuk dalam NKRI, dan bukan diwakili kelompok "*West Papua*" sebagaimana yang selama ini mereka tahu;
- d. Menunjukkan penghormatan atas komitmen Kepala Negara/ Pemerintahan RI atas peranserta Indonesia pada festival, sehingga memudahkan *engagement* RI ke kawasan Pasifik Selatan dan ke sub-kawasan MSG.
- e. Mendekatkan dan menghilangkan kecurigaan dan rasa asing diantara Provinsi-provinsi PNG sepanjang wilayah berbatasan RI-PNG dengan Provinsi Papua, di Indonesia, dan sebaliknya antara Provinsi Papua terhadap provinsi-provinsi tetangga mereka di PNG dalam rangka mempererat kerjasama berbagai bidang.

Kegiatan budaya pada *International School*

Setiap tahun Port Moresby *International School* (POMIS) mengadakan kegiatan *United Nation Concert*. Pada tahun 2012-2016 kegiatan jatuh pada tanggal akhir Mei. Kegiatan bertujuan memperkenalkan budaya tiap negara dengan menampilkan para anak didik POMIS. Pada kesempatan itu Indonesia menampilkan tari piring dan tari Saman yang dipersembahkan anak-anak Indonesia yang bersekolah di POMIS. Negara lain yang turut berperan-serta: Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Australia, Nigeria, Turki, Kanada, Malaysia, Filipina, India, Myanmar, Skotlandia, dan Irlandia.

Kesehatan

Fasilitas kesehatan masih rendah di PNG, jumlah rumah sakit sangat kurang dan dijejali banyak pasien yang sulit dapat ditampung di ruang atau bangsal yang tersedia, sedang peralatan teknologi kesehatan juga jauh dari memadai. Kondisi kesehatan masyarakat masih rendah, penyakit endemik dan menular umum dijumpai seperti *tuberculosis*, HIV, malaria, penyakit dalam akibat kebiasaan mengonsumsi alkohol berlebihan, kurang gizi, diphtheria, tetanus, dan campak.

Upaya pelayanan kesehatan masyarakat dihadang berbagai kendala dan system asuransi kesehatan nasional belum dikenal. Ciri wilayah yang tertutup, bergunung, berhutan, membuat

distribusi logistik obat dan perjalanan tenaga medis ke berbagai daerah sangat sulit. Ketersediaan infrastruktur listrik kurang memadai dan membuat penyimpanan *vaccine* dalam lemari pendingin sulit dilakukan. GDP/*capita* yang rendah dan praktek korupsi membuat kondisi penyediaan obat dan infrastruktur pelayanan kesehatan sulit berkembang.

Data UNICEF pada tahun 2014 menyatakan satu dari 13 anak di PNG meninggal dunia sebelum umur 5 tahun karena menderita malnutrisi. Statistik menunjukkan dari segi kecukupan asupan gizi dan vitamin, 45% dari anak-anak PNG menderita perlambatan pertumbuhan; 24% menderita kekurangan bobot badan; dan 14% menderita masalah pencernaan akut. Penderitaan anak-anak itu bukan saja menghambat pertumbuhan tetapi juga memperburuk kemampuan belajar. Hampir 50% pasien di rumah-rumah sakit PNG dihuni penderita malnutrisi, dan masalah itu tidak mampu hanya ditangani oleh sektor kesehatan. Diperlukan suatu system manajemen komprehensif pemerintah dalam mendeteksi dan mengatasinya segera. Anak penderita malnutrisi dapat segera meninggal akibat mengalami diare dan infeksi dada yang selalu mengikutinya. UNICEF membantu membentuk kebijakan nutrisi PNG secara multi sektoral serta memperbaiki *protocol* nasional mengenai penanganan penderita malnutrisi akut. UNICEF juga aktif memasok makanan *therapeutic* ke rumah-rumah sakit provinsi yang banyak penderita malnutrisi.

Data *Regional Western Pacific World Health Organization* pada Agustus 2014 menyebut tingginya peningkatan penderita *Tuberculosis* (TB) khusus yang *multi drug resistance* (MRD) di berbagai provinsi PNG yang bila tidak segera diatasi maka akan bereskalasi menjadi wabah TB, karena dapat tertular bahkan kepada perawat sendiri. Beberapa penderita TB tidak terjangkau perawatan dan obat, sedang penderita lainnya gagal secara penuh mengikuti pengobatan 6 bulan penuh sehingga akibatnya penyakit mereka meningkat ke stadium 2 yang disebut *multi drug resistance* (MRD). Penderita MRD memerlukan pengobatan yang lebih mahal selama 24 bulan dan harus mengkonsumsi 15 jenis obat yang berbeda setiap hari.

PERTAHANAN-KEAMANAN

Tugas Utama Angkatan Bersenjata PNG adalah mempertahankan PNG. Organisasi Pertahanan PNG harus mampu mempertahankan dan membela bangsa PNG dari serangan dan mengamankan wilayah perbatasan darat, udara dan laut.

Struktur dasar institusi AB-PNG terdiri dari :

1. Departemen Pertahanan (*Defence Department*).
Departemen Pertahanan dipimpin oleh seorang Menteri Pertahanan, membawahi Sekretaris Dephan, yang bertanggung jawab atas perencanaan dukungan terhadap kebutuhan pertahanan PNG dan membawahi pula Panglima AB-PNG yang bertanggung jawab akan pembinaan dan penggunaan operasional kesatuan. Saat ini Menteri Pertahanan PNG dijabat oleh Dr. Fabian Pok sedangkan Sekjen Dephan PNG adalah Mr. John Porty.
2. *Papua New Guinea Defence Force* (AB-PNG) / AB-PNG.

Pimpinan tertinggi di AB-PNG adalah *Chief of Defence Force*, setingkat dengan Panglima yang bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan. Adapun Panglima saat ini dijabat oleh Brigjen Gilbert Toropo.

Kemampuan

Force Structure, susunan organisasi penggunaan kekuatan AB, persenjataan termasuk senjata pemusnah massal.

Jumlah kekuatan personil sekitar ± 3.100 terdiri dari :

Angkatan Darat	=	2.350 orang.
Angkatan Laut	=	500 orang.
Angkatan Udara	=	250 orang.
Total	=	3.100 orang.

Kekuatan.

Angkatan Darat terdiri dari : 2 Batalyon Infanteri, 1 Batalyon Zeni, 1 Kompi Perhubungan.

1 Kompi Jihandak, 1 Kompi Mortir 81, 1 Unit Polisi Militer.

Angkatan Laut / Maritim terdiri dari : 4 unit Kapal Patroli, 2 unit Kapal jenis *Landing Craft Heavy*

(HCF)1 unit Kapal jenis *Landing Craft* HMAS, 1 unit Kapal Penyapu Ranjau, Angkatan Udara terdiri dari : 1 Skuadron Pengangkut yang terdiri dari 2 (dua) buah Casa CN-235M-100 ex Spanyol dan 1 (satu) buah Casa C212-200 (dalam kondisi *grounded*) dan 3 (tiga) unit Arava RV IAI-201 (1 dalam keadaan *Grounded*), 1 Skuadron *Transport Helicopter* 4 (empat) buah helikopter jenis Bell 205 UH-1H *Iroquois* ex Australia (2 dalam kondisi *grounded*) dan 4 (empat) buah Nomad NB-22 (dalam kondisi *grounded*).

Anggaran Belanja.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran AB-PNG 2016 sebesar K. 260 juta (\pm Rp. 1,04 triliun) dengan perincian bahwa K. 126 juta (\pm Rp.504 miliar) untuk pembayaran gaji prajurit, K. 134 juta (\pm Rp.536 miliar) untuk pembelian barang-barang dan jasa termasuk perekrutan personel. Disamping itu AB-PNG juga akan diberikan dana tambahan diluar anggaran belanja tersebut sebesar K.170 juta selama 5 tahun dimana untuk yang ke-4 di tahun 2016 ini menerima sebesar K. 40 juta (\pm Rp.160 miliar).

Rencana Pengembangan Kekuatan

Pemerintah akan menambah jumlah prajurit AB-PNG menjadi 5.000 prajurit sampai tahun 2017 yang terdiri dari 4.000 prajurit reguler dan 1.000 prajurit cadangan.

AB-PNG berencana membeli 4 unit pesawat jenis *very short take off and landing* (VSTOL) dari New Zealand dan hal ini masih dalam pembahasan kedua belah pihak. Pemerintah PNG telah mengalokasikan dana sebesar K. 60 juta (\pm Rp. 258 miliar) untuk pembelian pesawat terbang tersebut dan hal ini sejalan dengan Buku Putih Pertahanan 2013 salah satunya yaitu *upgrade* matra udara.

Perjanjian antara RI-PNG dalam bidang Pertahanan.

Status of Forces Agreement (SOFA). Persetujuan Status Angkatan Bersenjata ditandatangani pada tanggal 14 Januari 1992. Pada intinya persetujuan ini mengatur tentang perlakuan antar kedua Angkatan Bersenjata yang sedang melakukan tugas dan berada di wilayah salah satu negara.

Memorandum of Understanding on Joint Civic Action antara TNI dengan AB-PNG ditandatangani pada Juni 1992. *Joint Civic Action* ini dimaksudkan untuk mengatur pelibatan/kerjasama satuan Zeni kedua Angkatan Bersenjata dalam rangka membantu pembangunan fasilitas umum/masyarakat ditempat-tempat terpencil.

Standard Operating Procedures (SOP) *on Security Matters Relating to Border Areas of PNG and Indonesia*, ditandatangani pada tanggal 2 Nopember 1998. SOP ini mengatur kerjasama antara TNI dan AB-PNG dalam rangka pengamanan perbatasan kedua Negara.

Defence Cooperation Agreement (DCA), ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2010 saat kunjungan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono ke Port Moresby, PNG. DCA ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin antara Pemerintah RI dengan Pemerintah PNG melalui kerjasama dalam bidang Pertahanan.

Bentuk kerjasama yang telah berjalan periode 2015 s.d 2016

Pendidikan

Tahun 2015, AB-PNG telah mengirimkan 1 orang perwira untuk mengikuti Lemhanas LV 2016. Pendidikan ini akan berakhir pada 10 November 2016.

Latihan

Tahun 2015, AB-PNG mengirimkan seorang perwira untuk mengikuti workshop 41st *World Congress on Military Medicine* (WCMM) di Bali.

Tahun 2016, AB-PNG mengirimkan 2 kapal Patroli beserta 38 orang kru berpartisipasi dalam Komodo Exercise 2016 di Padang, Sumatera Barat.

Tahun 2016, AB-FIJI akan mengirimkan 2 orang Perwira untuk mengikuti UNSOC pada 05 s.d 16 September 2016 di PMPP, Sentul, Bogor.

Alutsista : Pemeliharaan rutin Pesawat Cassa AB-PNG di PT. Dirgantara Indonesia, Bandung.

Pertukaran Info

Melaksanakan pertemuan rutin JIDD, BLM/JBC dan JSCSM setiap tahun.

Melaksanakan pertemuan *Special Session Border Issues* (SSBI).
Rencana pelaksanaan Intellex Bais TNI dan BID AB-PNG.

Profil Kepolisian PNG.

Kepolisian PNG merupakan hasil penggabungan antara Kepolisian “New Guinea” dan Kepolisian “Papua”. Kepolisian New Guinea terbentuk pada tahun 1884 dibawah kekuasaan penjajah Jerman, sedangkan Kepolisian Papua terbentuk pada tahun 1891 dibawah kekuasaan penjajah Inggris. Pada tahun 1946 setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2, Papua dan New Guinea digabung menjadi satu dengan nama “Papua New Guinea” dibawah Perjanjian Perwakilan PBB, dan secara Administrasi dibawah penjajahan Australia. Nama Kepolisian PNG pada saat itu adalah *Royal Papuan Constabulary and New Guinea Police Force*, dan pada tahun 1973 berubah nama menjadi *Royal Papua New Guinea Constabulary (RPNGC)*.

Kepolisian PNG atau *Royal Papua New Guinea Constabulary* dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian yang saat ini dijabat oleh *Commisioner* Gari Baki dan berada dibawah Menteri Kepolisian yang saat ini dijabat oleh Hon Robert Atiyafa. Sesuai dengan Undang-undang PNG tahun 1973, Kepolisian PNG terpisah dari Angkatan Bersenjata PNG.

Secara umum Kepolisian PNG terdiri dari :

Auxiliary Police/Polisi Umum, yang melaksanakan Tugas Rutin Kepolisian seperti Pengamanan, Patroli keamanan kota, Lalu lintas dan lain-lain.

Mobile Squad, yang dibekali dengan kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan Tugas Khusus dan Operasi Keamanan dalam negeri dan siap digerakkan ke seluruh wilayah PNG.

Kekuatan. Jumlah personel Kepolisian PNG yaitu sekitar 6.300 personel. Memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Rasio perbandingan di PNG yaitu 1 : 1.250.

Pengembangan kekuatan.

Pemerintah yang akan menambah kekuatan Kepolisian hingga 10.000 personel pada tahun 2017.

Untuk meningkatkan kinerja institusi Kepolisian, Pemerintah PNG akan melaksanakan modernisasi di tubuh institusi Kepolisian dengan menginvestasikan dana sebesar K. 2 miliar (±Rp. 9 triliun). Dana ini akan digunakan untuk pelaksanaan 26 proyek, salah satu diantaranya adalah pemasangan CCTV dan alat komunikasi serta pengadaan Helikopter untuk mendukung *air tactical unit*.